

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara dikatakan negara maritim dengan ciri-ciri memiliki kawasan teritorial laut yang luas, negara umumnya berbentuk kepulauan yang memiliki banyak pulau, memiliki kekayaan alam laut yang luas dan secara geografis negara dikelilingi wilayah perairan dan laut. Indonesia masuk ke dalam ciri-ciri tersebut. Laut Indonesia mengandung kekayaan alam yang sangat besar dan beraneka ragam, baik yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Dengan banyaknya peluang dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia membuat laut Indonesia menjadi sumber daya ekonomi (Mulyadi, 2007).

Konsep negara maritim yaitu memanfaatkan dan menggunakan segala sumber kekayaan laut yang ada untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Luas laut Indonesia dibandingkan dengan luas daratan yaitu 70 banding 30. Potensi ini dilihat oleh beberapa perusahaan yang bergerak di sektor maritim, yaitu perusahaan yang kegiatannya menyediakan produk layanan yang terkait dengan sektor maritim seperti perusahaan yang bergerak di sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, industri pengolahan dan energi, pariwisata bahari, angkutan laut, jasa perdagangan, industri maritim.

Saat ini lebih dari 30 perusahaan sektor maritim, termasuk bidang kelautan dan perikanan yang telah mendaftarkan perusahaan mereka di Bursa Efek Indonesia untuk *go public* sehingga dapat menarik perhatian investor agar

memperoleh dana tambahan melalui pasar modal, dan ini masih akan bertumbuh, seiring dengan bertambahnya minat perusahaan sektor maritim untuk *go public* pula. Melihat adanya peluang bisnis ini, mendorong perusahaan untuk saling bersaing mengembangkan produk serta meningkatkan kinerja perusahaannya dalam mencapai perubahan yang baik. Salah satu upaya perusahaan untuk mendapatkan penanam modal di perusahaannya adalah dengan investasi melalui pasar modal. Pasar modal yaitu pasar uang yang terorganisir dimana produk-produk yang di jual berupa saham, obligasi dan reksa dana. Kebanyakan orang memilih untuk berinvestasi dalam pasar modal karena melihat keuntungan yang didapatkan dan selain alasan itu, banyaknya memilih pasar modal untuk investasi karena instrument yang dijual bersifat jangka panjang dan dapat diperjual belikan (Arifirdhani, 2020). Produk pasar modal yang banyak diminati investor adalah saham dikarenakan saham dinilai dapat memberikan keuntungan yang menarik.

Dalam melakukan investasi, tentu banyak pertimbangan bagi para investor termasuk risiko yang dapat timbul serta return saham yang akan diperoleh nantinya. Salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut adalah situasi keuangan dan sumber daya yang ada didalamnya. Hal ini tentu akan berpengaruh dengan dividen yang akan diberikan kepada investor. Dividen adalah laba atau keuntungan yang diberikan kepada investor atau bisa disebut juga pemilik saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam perusahaan tersebut.

Ada kalanya perusahaan tidak memberikan dividen kepada pemilik saham, dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang tidak mengalami keuntungan atau

laba di akhir periode tertentu. Pembayaran dividen kepada para pemegang saham, tergantung dengan kebijakan dividen masing-masing perusahaan yang diambil pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seperti yang dilakukan PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.(HITS). Dikutip dari Bisnis.com, PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. batal membagikan dividen saham secara penuh untuk tahun buku 2019. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) usulan pembagian dividen untuk tahun buku 2019 ditolak oleh pemegang saham mayoritas, pemegang saham meminta agar saham tersebut dijual sebagai modal tambahan untuk pengembangan usaha. Kebijakan yang diambil HITS saat itu adalah membagikan 50% saham treasury untuk dividen dari total saham treasury yaitu sebanyak 131.747.188 lembar saham yang setara dengan Rp.6,58 miliar. Kebijakan dalam penentuan harga dividen saham adalah harga pasar saham penutupan perdagangan satu hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pembayaran dividen dapat diukur dengan menggunakan dividen payout ratio. Jika perkembangan dividen payout ratio mengalami penurunan setiap tahunnya, maka dapat dinilai negatif oleh para investor. Hal ini dikarenakan investor mengharapkan tingkat pengembalian investasi dalam bentuk dividen yang tinggi sesuai kepemilikan sahamnya. Oleh karena itu baik investor maupun perusahaan perlu memperhatikan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu dividen payout ratio (Roos & Manalu, 2019).

Dalam kebijakan dividen ini ada kepentingan dua pihak yang terlibat, yaitu pemegang saham dan manajer perusahaan. Adapun keterlibatan manajer dalam

menentukan kebijakan dividen perusahaan adalah untuk menyetarakan kepentingan manajer dengan pemegang saham, yang akan dihadapkan dengan keraguan. Apakah keuntungan perusahaan akan digunakan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham atau akan digunakan sebagai laba yang ditahan dalam perusahaan untuk pembangunan usaha.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu bagian dari cara untuk meminimalisir *agency cost* karena dapat mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Pengawasan ini dilakukan oleh investor karena ketergantungan investor institusional pada besarnya investasi yang dilakukan. Dewan komisaris pun berperan dalam melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi sehingga dapat memastikan perusahaan melaksanakan *corporate governance* (Kurniawati *et al.*, 2015).

Dewan komisaris dapat mewakili direktur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila direktur berhalangan hadir. Dalam pembagian dividen perusahaan dapat melihat pertimbangan dewan komisaris terhadap kebijakan dividen yaitu pertimbangan pembagian dividen, jenis dan jumlah dividen yang dibagikan (Pratama, 2015).

Ukuran perusahaan dapat menentukan besarnya dividen yang dibagikan karena semakin besar ukuran perusahaan maka omset dan laba yang dihasilkan juga semakin tinggi, dan jika laba tinggi maka dividen yang dibagikan juga semakin tinggi. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan dividen. Keempat hal tersebut yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan dapat dikaitkan

sebagai faktor yang dapat mempengaruhi atau tidaknya terhadap kebijakan dividen perusahaan (Aziz *et al.*, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Maulida, 2020), menemukan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, peluang investasi dan likuiditas secara parsial mempengaruhi kebijakan dividen. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fuadi, 2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan likuiditas yang diprosikan dengan current ratio (CR) secara parsial berpengaruh terhadap kebijakan dividen yang diprosikan dengan dividen payout ratio (DPR) dan likuiditas secara tidak signifikan memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen dan secara signifikan memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2015) pula, menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen yang menjelaskan apabila tingkat kepemilikan manajerial tinggi pada suatu perusahaan maka perusahaan cenderung mengalokasikan laba pada laba ditahan dari pada membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan alasan sumber dana internal lebih efisien dari pada sumber dana eksternal. Sedangkan pengujian pada kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen yang dijelaskan besar kecilnya kepemilikan badan institusi pada perusahaan tidak mempengaruhi kebijakan dividen yang akan diambil. Pada penelitian ini juga, didapat bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap

kebijakan dividen dengan alasan semakin banyak dewan komisaris maka akan semakin meningkat jumlah dividen yang akan dibagikan.

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menguji variabel independen dan dependen yang sama, penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan menambah ukuran perusahaan sebagai variabel independen lainnya. Saat ini perusahaan yang bergerak di sektor maritim sudah banyak mendaftarkan perusahaan mereka di Bursa Efek Indonesia. Banyaknya minat perusahaan yang mulai *go public* yang salah satu tujuannya untuk mendapatkan dana tambahan melalui pasar modal, antusias ini menarik perhatian penulis untuk menjadikan perusahaan sektor maritim yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena hal tersebut penulis mengangkat judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen dengan Likuiditas sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Maritim yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa perusahaan memilih untuk mempertahankan laba daripada membagikan dividennya dengan tujuan sebagai tambahan modal dalam mengembangkan perusahaan. Dividen yang belum pasti dibagikan dan jumlahnya juga yang belum pasti dibagikan disetiap tahun tutup buku karena hal ini akan menyesuaikan kondisi perusahaan tersebut yang akan dibicarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kepemilikan institusional, ukuran dewan

komisaris dan ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dalam mengambil keputusan. Adanya pula perbedaan hasil penelitian dengan variabel penelitian yang sama, maka penelitian ini dilakukan agar diketahui kembali faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dengan likuiditas sebagai variabel moderasi. Dan dengan melihat banyaknya perusahaan sektor maritim yang mulai mendaftarkan perusahaannya di Bursa Efek Indonesia, membuat penulis tertarik untuk menjadikan perusahaan sektor maritim menjadi objek penelitian.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?

5. Apakah likuiditas memoderasi hubungan kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
6. Apakah likuiditas memoderasi hubungan ukuran dewan komisaris terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
7. Apakah likuiditas memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?

#### **1.4 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang akan menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI dengan periode 2017-2021.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen dengan menggunakan dividend payout ratio sebagai pengukur dengan membagi dividen perlembar saham dengan laba per lembar saham.
3. Variabel independen dalam penelitian ini membahas kepemilikan institusional dihitung dengan membagi jumlah saham pihak institusi dengan jumlah saham yang beredar, ukuran dewan komisaris dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris perusahaan, ukuran



perusahaan dengan menghitung log natural dari jumlah aset perusahaan yang dimiliki.

4. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah likuiditas dengan menggunakan pengukuran current ratio memperhitungkan aset lancar dibagi utang lancar.

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
4. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

5. Untuk mengetahui apakah likuiditas memoderasi hubungan kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
6. Untuk mengetahui apakah likuiditas memoderasi hubungan ukuran dewan komisaris terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
7. Untuk mengetahui apakah likuiditas memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor maritim yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berdampak pada pengembangan ilmu akuntansi keuangan yaitu sebagai referensi yang dapat memberikan informasi teoritis maupun empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang relevan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi masukan serta bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya dividen yang akan dibagikan

kepada pemegang saham agar dapat menguntungkan semua pihak terkait.

## 2. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sebagai bahan pertimbangan investor dan calon investor untuk menginvestasikan sumber dayanya pada perusahaan.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini mempermudah pembahasan dalam penelitian.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penelitian dilakukan dengan diawali penguraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

Bab ini terdapat kajian pustaka, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis dan hipotesis.

### **BAB III: METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, operasionalisasi variabel serta metode penentuan populasi dan sampel.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian.

